

PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Moh. Sakir

Pascasarjana UNSIQ Wonosobo

Abstract: *Existence of Islamic education have big role in the education history at Indonesia, but the role still haven't full independence it's political and also its implementation. This matter look by law that formal Islamic education which known by government is Islamic education. Known education is madrasah which have been registered through MAPENDA under Kemenag. Islamic Boarding School still in confession of Moslem society alone which only accepted by Moslem society itself. Therefore Islam people fight not only conducting education but also overall of financing side, education political and independence. Thereby Islamic education require to be improved again by entire all stakeholder Moslem society for the sake of Islamic education as same as Islam aspiration. Appearance of public education system and Islamic education are two sides cannot separate each other in national education system, both related and equipping each other. In the one side the aim of national education is to develop student's potency in order to become god-fearing and religious, good manner, healthy, knowable and expected to be democratic citizen and responsible.*

ملخص: أسهم التربية الإسلامية اسهاما كبيرا في تاريخ التربية الإسلامية في إندونيسيا. لكن وجودها لم يُعط لها الاستقلالية التامة سياسيا وتطبيقيا. وهذا يظهر قانونيا رسميا أن التربية الإسلامية المعترفة لدى الحكومة هي التربية المتميزة بالتعاليم الإسلامية، وهي المدارس الإسلامية المسجلة في مجلس التربية الأساسية في وزارة الشؤون الدينية. أما البسنترينات فهي معترفة لدى المجتمع المسلم أنفسهم. لذا فإن جهاد المسلمين في التربية لا يكون فقط في تطبيق التربية فحسب لكنه في جميع الجوانب، التكاليف والسياسة التربوية والاستقلالية. بهذا لا بد من ترقية التربية الإسلامية الموجودة بمشاركة جميع الشخصيات في المجتمع المسلم لتكون التربية الإسلامية موافقة بما يريده الإسلام. فظهور النظام التربوي العام والنظام التربوي الإسلامي في النظام التربوي الإندونيسي لا يمكن فصلهما، لأنهما مرتبطان ولكل خصائصه ومميزاته المتكاملتان. في جانب أن أهداف التربية الوطنية هي تنمية قدرات التلاميذ ليكونوا أناسا مؤمنين بالله ومتقين، ومتخلقين بأخلاق كريمة، أصحاء جسميا ولهم علوم ويرجى أن يكونوا مواطنين أمناء وديمقراطيين.

Keywords: Pendidikan Islam, pesantren, madrasah.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana paling efektif untuk membangun karakter suatu bangsa. Pendidikan secara umum dapat dipahami sebagai media atau alat (*tools*) bagi pencapaian pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan era sekarang ini tetap dianggap sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tuntutan dunia yang mengglobal, baik pada sektor peningkatan kualitas terhadap dunia informasi dan teknologi ataupun kepada persoalan peningkatan moral dan akhlak, yang penekanannya pada etik pendidikan dan peran moral¹

Menurut Wardiman Joyonegoro, manusia yang berkualitas itu setidaknya-tidaknya mempunyai dua kompetensi, yaitu kompetensi bidang imtaq (iman dan taqwa) dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).² Dua hal inilah yang menjadi garapan lembaga pendidikan Islam, namun kenyataannya lembaga pendidikan Islam (baca: madrasah) masih mengalami kendala dalam pengembangan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, lembaga pendidikan diharapkan merubah paradigmanya baik dari sisi manajemen, kepemimpinan, perubahan kurikulum, serta budaya mutu yang berkelanjutan. Lembaga pendidikan Islam dihadapkan berbagai persoalan yang mendasar, ia ibaratnya dua sisi mata uang, mengemban nilai-nilai moralitas yang dikembangkan dari basis Agama, biasanya yang berbasis agama bersifat absolut, susah untuk berubah, dan juga menghadapi arus globalisasi yang tidak mengenal batas-batas wilayah etika lokal.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Tilaar bahwa untuk memasuki abad XXI dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara profesional sehingga menghasilkan *output* yang unggul.³ Salah satu aspek yang sering dilupakan untuk bersaing meraih keberhasilan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien adalah penataan manajemen. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pendidikan yang berkualitas atau bermutu juga diperlukan perubahan visi dan misi baru dalam lembaga pendidikan.

Sektor pendidikan dalam era kompetisi dan globalisasi tetap diposisikan sebagai garda depan, karena pendidikan dianggap sebagai kekuatan yang mampu menjadikan masyarakat yang maju, produktif, dan disegani bangsa lain.

¹ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), 183.

² Wardiman Joyonegoro, *Potensi Serta Peran Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Makalah disajikan dalam Musyawarah IV RMI di PP As-Shidiqiyah, 1 Februari 1994. baca ; Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003) 175.

³ Tilaar, H.A.R. *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif abad 21*, (Jakarta, 1998), 245.

Karena melalui pendidikan semua tatanan dalam berbagai sektor kehidupan dapat dicapai, baik bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maupun peningkatan kehidupan bangsa yang layak dan bermartabat. Salah seorang peraih nobel bernama John Nash mengatakan bahwa sektor pendidikan memberikan kontribusi tertinggi dalam mencapai tingkat perekonomian suatu bangsa⁴.

Dalam sektor lain, pendidikan tetap menjadi garda depan bagi peningkatan kualitas dan pengetahuan suatu masyarakat. Tanpa pendidikan, masyarakat atau bangsa tidak akan dapat memahami dan mengetahui realitas lingkungan yang dihadapi. Pendidikan dianggap penting dalam upayanya untuk mencerahkan, mengajarkan, dan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa.

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus untuk mengembangkan potensi seseorang atau subyek didik, baik dari dimensi personal maupun sosial, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai dengan tujuan agama, bangsa dan negara Indonesia.

Terkait dengan pendidikan Islam tidak terlepas dari sumber ilmu yang didasarkan Al-qur'an dan al-Hadits. Pendidikan Islam tidak terlepas dari dasar filosofis yang terkandung dalam Al-Qur'an (surat al-'Alaq: 1-3), Allah berfirman dengan bahasa yang tegas: "bacalah!!, dengan Asma Tuhanmu, yang telah menciptakan'. Bacalah yang pemakalah maksud adalah bagaimana upaya yang dilakukan suatu kaum untuk memahami, mengerti serta dapat mengartikulasikan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Pada proses mengartikulasikan fenomena dan realitas tersebut terjadi proses didaktik (*education*).

Pandangan yang berusaha untuk tidak mendikotomikan antara pendidikan umum dan Pendidikan Islam, sebagaimana yang saat ini sedang terjadi. Karena pada prinsipnya pendidikan Islam maupun pendidikan umum, terdapat tata nilai-nilai (*values*) dan kebijaksanaan (*wisdom*). Namun dalam realitas dan konstelasi perpolitikan dan pendidikan di tanah air, antara pendidikan umum dan pendidikan Islam tidak diposisikan secara setara (*equal*), baik menyangkut kebijakan (*policy*), penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sampai kepada persoalan-persoalan teknis lain.⁵

Akan tetapi pada makalah ini akan kita diskusikan menyangkut pendidikan Islam dalam konstalasi pendidikan Nasional. Berbicara tentang pendidikan Islam

⁴ Kompas, 17 Desember 2005

⁵ Hal ini tidak bisa terlepas dari sejarah adanya departemen yang berbeda dalam menentukan arah kebijakan pendidikan nasional. Departemen yang menjadi rujukan oleh sistem pendidikan dalam negeri harus mengambil dari kebijakan yang dirumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional (1946) atau Departemen Agama (1946), atau mengadopsi dari dua sistem tersebut.

di tanah air, secara kelembagaan diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu : 1). pendidikan pondok pesantren, 2) pendidikan madrasah sebagai sekoalah umum dengan ciri khas agama islam dan perguruan tinggi Islam (STAIN/IAIN/UIN) yang bernaung di bawah DEPAG, 3) pendidikan umum yang bernafaskan islam, yang diselenggarakan atau dibawah naungan organisasi islam, 4) pelajaran agama islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah semata 5) pendidikan islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, forum pengajian, majelis taklim, dan jenis lainnya yang diprakarsai masyarakat (jenis pendidikan Islam nonformal).⁶

Lantas bagaimana hubungan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dengan UUSPN 2003? Dalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 mengklasifikasikan jalur pendidikan menjadi Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Informal (Bab IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN, pasal 13 ayat 1). Dari sinilah kita melihat pijakan yang dipakai pendidikan Islam secara implisit mengacu kepada jalur pendidikan yang sesuai secara kelembagaan.

Apakah secara umum pendidikan Islam sekarang ini masih terpinggirkan secara kebijakan menyangku kebijakan (*policy*)? atau sudah mendapatkan proporsi yang semestinya (baik dalam hal pendanaan) dari pemerintah? atau bahkan pendidikan Islam sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dari sisi kualitas maupun kuantitas? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memerlukan jawaban yang didasari dari realitas yang ada sekarang terkait wajah pendidikan Islam.

LANDASAN KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Konsep ideal pendidikan Islam memiliki pandangan filosofis yang mengambil contoh ideal dari Nabi Muhammad sebagai suri tauladan (*uswatun khasanah*), dan bertujuan membentuk manusia yang ideal (*insan kamil*) melalui proses *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib*. Hal tersebut yang menjadi landasan dalam merealisasikan konsep ideal dalam pembentukan karakter pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia secara umum memang mempunyai tujuan yang demikian. Karena setiap pelacakan terhadap dasar pendidikan Islam, yang menjadi acuan utama adalah al-Qur'an dan al-Hadits.⁷Di sisi lain salah satu tujuan pendidikan Islam bertujuan mengembangkan fitrah sebagai hamba Allah yang didasarkan atas

⁶ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), vii.

⁷ Heri Noer Ali, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 15.

asumsi dasar tentang hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia lain, serta lingkungan sesuai ajaran Islam.⁸

Tujuan pendidikan Islam seperti yang dirumuskan oleh Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani salah seorang ahli pendidikan Islam memberikan ciri dan prinsip-prinsip umum yang dijadikan dasar untuk mencapai tujuan utama cita-cita pendidikan Islam, maka pendidikan harus mampu melahirkan kekuatan tiga dimensi yang saling terkait dengan yang lainnya;

- a. Dimensi Imanitas yang dapat mendudukan harkat dan martabat manusia sebagai hamba Allah yang tertinggi di dunia serta punya daya tahan terhadap ujian hidup dan berpijak pada kebenaran.
- b. Dimensi jiwa dan pandangan hidup Islam yang membawa cita *rahmatan lilalamin*.
- c. Dimensi kemajuan yang akan memajukan manusia tangguh terhadap apa yang ditahankan oleh Allah dan terhadap segala kejadian suatu perubahan yang ada.⁹

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan atas dasar hasrat ketauhidan, motivasi ibadah, dan semangat dakwah untuk memanifestasikan/mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik nilai ketuhanan maupun nilai kemanusiaan, melalui kegiatan pendidikan sebagaimana tercakup dalam lima program dan praktek pendidikan Islam¹⁰. Sedangkan Ahmat Tafsir memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Hal ini sesuai dengan rumusan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa;

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab”.¹²

⁸ Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 9.

⁹ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 161.

¹⁰ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), vi.

¹¹ Ahmat Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 1994), 8.

¹² Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Media Wacana, Yogyakarta, 2003), 12.

Melihat fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas, terlihat bahwa pendidikan tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai spritual dan keimanan yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu pendidikan keagamaan merupakan hal yang sangat vital atau penting, apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sistem pendidikan umum dan pendidikan Islam adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional, keduanya saling terkait dan masing-masing memiliki kekhususan untuk saling melengkapi. Di satu sisi tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan diharapkan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹³

Hubungan antara pendidikan Islam dalam pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pendidikan Islam secara ideal memang harus diarahkan kepada transformasi nilai-nilai yang kemudian diharapkan mampu menjadi jalan keluar untuk memecahkan persoalan bangsa.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam (dalam hal ini adalah madrasah) secara ideal -seperti yang dirumuskan melalui kesetaraan dalam UUSPN 2003 yang disebut sebagai pendidikan umum yang bercirikan Islam- dituntut harus mampu menyejajarkan dengan ketertinggalannya di bidang penguasaan ilmu-ilmu yang dipelajari di lembaga pendidikan umum. Sehingga diharapkan jarak kesenjangan yang terlalu jauh antara kualitas pendidikan Islam dan pendidikan umum dapat diperkecil.¹⁴

Pendidikan Islam memang seharusnya diarahkan untuk memiliki kemampuan dalam mendidik bangsanya tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan agama (*ilmu fardlu 'Ain*) saja, namun dalam prakteknya harus mampu menguasai ilmu pengetahuan melalui panca indera (*ilmu fardlu kifayah*).¹⁵

Pendidikan Islam yang bertujuan membentuk karakter manusia Indonesia yang baik dirumuskan melalui sistem pendidikan yang dilembagakan dalam berbagai bentuk. Seperti yang telah disebut di atas, lembaga pendidikan Islam

¹³ Bab II Pasal 3 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ Muhaimin, *Wacana*, 25.

¹⁵ Meminjam istilah yang dikemukakan oleh Syed M. Naquib al-Attas (1931-...), yang paralel dengan pandangan al-Ghazali (w. 1111 M).

secara kelembagaan meliputi pesantren, madrasah, pendidikan tinggi Agama Islam, dan lembaga yang bercorak Islam (sekolah umum yang bercirikan Islam).¹⁶

Salah satu tujuan dari berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam secara umum adalah membentuk karakter manusia ideal seperti yang termaktub dalam salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk masyarakat yang beradab, adil, makmur, dan bermartabat. Disinilah letak kesamaan yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan karena tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak saling bertentangan, atau bahkan dapat dikatakan tujuan pendidikan nasional juga mencakup salah satu tujuan dalam pendidikan Islam.

Paradigma yang dibangun oleh pendidikan Islam harus berangkat dari normativitas ajaran Islam dengan tidak melupakan pijakan realitas dimana pendidikan Islam dibutuhkan oleh umat Islam. Hal ini untuk menghindari visi dan misi yang terlalu idealis sehingga tidak mampu menjawab persoalan realistik umat Islam yang menjadi sasaran dari proses pendidikan Islam. Konsep idealis yang terlalu dipaksakan dalam paradigma pendidikan Islam akan menjauhkan dari tujuan semula.

Pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam sebagai bagian dari program pendidikan nasional mempunyai fungsi strategis dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama Islam, di samping pengembangan intelektual. Pendidikan agama Islam (PAI) sebagai bidang studi pada jalur pendidikan sekolah merupakan kenyataan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dalam klasifikasi ranah tujuan pendidikan, pendidikan agama Islam berfungsi untuk mencerdaskan intelektual, emosional dan spiritual siswa secara simultan dan terpadu. Dengan demikian pendidikan agama Islam mencakup pembinaan dan pengembangan seluruh aspek kepribadian.

Namun persoalannya adalah adanya indikasi bahwa dalam pendidikan agama Islam selama ini justru terjadi kesenjangan antara wilayah pengetahuan dan pengamalan. Dalam banyak kasus, pendidikan agama Islam di sekolah belum secara signifikan menunjukkan adanya hubungan yang searah, artinya bahwa hasil pembelajaran pendidikan agama Islam belum mencerminkan sikap keseharian dalam bentuk ibadah atau akhlak. Pendidikan agama Islam belum menunjukkan secara jelas tentang pembentukakan karakter dan kepribadian keagamaan peserta didik yang baik dari hasil atau *out put* pendidikan agama Islam di sekolah.¹⁷

¹⁶ Shaleh, *Madrasah*, 147.

¹⁷ Lihat Tasman Hamami, "Membangun Visi Baru Pendidikan Agama Islam", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. I, Januari 2003.

Pendidikan agama Islam di sekolah sangat penting dan strategis untuk membangun kepribadian keagamaan sejak dini, terutama Sekolah Menengah Pertama, yang merupakan pendidikan dasar keagamaan yang penting, mengingat pada masa ini pendidikan agama masih di dominasi oleh pendidikan keluarga. Rasa keagamaan siswa SMP (13-15 tahun) menurut Zakiah Daradjat adalah perkembangan agama pada anak usia remaja ditandai dengan pemahaman agama yang lebih abstrak, kurang ritualistik.¹⁸ Penanaman nilai-nilai keberagamaan melalui pendidikan agama Islam merupakan pendidikan pokok yang tidak bisa dilepaskan dari peran guru-guru agama Islam. Guru pendidikan agama Islam dituntut meningkatkan pengembangan kompetensi pengajarannya yang sesuai dengan perkembangan anak didik atau peserta didik yang semakin kompleks, akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Mencerdaskan bangsa, bukanlah tanggung jawab pendidikan umum semata, tetapi secarta holistik dan totalitas tanggung jawab pendidikan secara utuh, baik pendidikan umum, pendidikan agama yang termaktub dalam UUSPN 2003, baik pada jenjang pendidikan formal, non formal dan informal.

Dalam konstalasi perpolitikan, tercatat dalam sejarah bangsa sebelum kemerdekaan, pendidikan umum dan pendidikan agama didikotomikan oleh pemerintahan kolonial (terformat melalui kebijakan pemerintahan kolonial belanda dengan menjadikan pendidikan umum dibawah kebijakan kolonial, tanpa memasukkan unsur pendidikan agama khususnya pendidikan Islam)¹⁹. Zaman Orde Lama, Orde baru, hingga zaman Reformasi sering terjadi friksi-friksi kepentingan atas nama '*agama*' antara nasionalis dan religius (Islam).

Idealnya pendidikan adalah untuk penyatuan dan pemberdayaan bangsa, tanpa adanya pendikotomian hak dan wewenang antar lembaga, kebijakan (*policy*), sampai kepada persoalan teknis lainnya, seperti MTs, MA, dan PTAIN/PTAIS yang dikelola DEPAG, sedangkan pendidikan umum dikelola DEPDIKNAS. Padahal pada lembaga dan pendidikan umum terdapat pelajaran agama. Barangkali inilah yang menjadikan pendidikan agama dan pendidikan umum dalam kompetisi global tetap berada pada posisi "*dibawah rata-rata*" negara-negara seluruh dunia.

REALITAS KULTURAL PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam secara empirik adalah pesantren dan madrasah yang memiliki sistem yang baik dan terarah. Walaupun pendidikan pada dasarnya tidak hanya itu, misalnya saja pengajian, majlis ta'lim, dan masih banyak lagi yang sifatnya

¹⁸ Zakiyah Dardjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang 1970), 449

¹⁹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta, LP3ES. 1994), 1-30.

eksidental. Namun di sini yang paling penting adalah madrasah dan pesantren yang jelas telah eksis sampai sekarang telah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kiprah pesantren dan madrasah tidak bisa dianggap remeh.

Secara konsep pesantren kadang dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang dimiliki oleh umat Islam “pesantren” merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren ini didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, hal ini dapat dilihat dari perjalanan panjang sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pondok pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa semenjak kurun kerajaan Islam pertama di Aceh pada abad pertama hijriah, kemudian pada masa walisanga sampai permulaan abad XX M para wali dan ulama yang menjadi cikal bakal sebuah desa baru.²⁰

Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan lain, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik—keunikannya itu setidaknya ditunjukkan oleh pola kepemimpinan yang berdiri sendiri, literatur universal yang telah dipelihara selama berabad-abad dan sistem nilai yang berbeda (terpisah) dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat di luar pesantren. Meskipun dalam perkembangannya, banyak pesantren yang telah membuka sistem pendidikan sekolah atau madrasah, yang berarti pola kepemimpinan yang ada melibatkan pihak luar. Kemudian dari segi literatur juga berubah, hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku dan penyerapan inspirasi nilai-nilai masyarakat guna memenuhi tuntutan zaman, namun ketiga keunikan tersebut tetap dapat melekat dalam banyak pesantren. Keunikan lainnya yang justru menjadi ciri pokok dari sistem pendidikan pesantren adalah prinsip nilai yang mendasari pelaksanaan pendidikan yakni nilai-nilai islami yang diajarkan dalam al-Qur’an dan Hadits. Prinsip nilai dalam pendidikan pesantren adalah *teocentric*. Prinsip *teocentric* ini dapat dijabarkan menjadi nilai ibadah, kebijaksanaan, kesederhanaan, kemandirian, hubungan kolektif dan kebebasan yang dipimpin, dengan tujuan membentuk pribadi manusia yang berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan tata nilai kehidupan masyarakat Indonesia, di samping aspek intelektual inovatif dan kesenian serta kehidupan kembali nilai-nilai moral dan agama. Tujuan ini pada akhirnya bermuara pada fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan dan mencakup petugas-petugas agama di dalam komunitas Islam, sehingga akan menjamin proses Islamisasi dalam setiap tahap perjalanan ruang dan waktu—lembaga pendidikan ini telah berkembang di Jawa selama berabad-abad lamanya.²¹

²⁰ Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bakti, 1982), hlm. 7.

²¹ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1979), 263.

Potret pesantren pada dasarnya adalah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai.²² Asrama untuk para siswa ini biasanya berada dalam kompleks pesantren di mana kyai bertempat tinggal. Di samping itu juga terdapat fasilitas ibadah berupa masjid, kemudian kompleks pesantren sendiri biasanya dikelilingi oleh tembok yang digunakan sebagai upaya untuk memudahkan dalam mengawasi arus keluar-masuknya para santri. Jika dilihat dari aspek kepemimpinan, pesantren hingga saat ini masih banyak yang menggunakan pola “kepemimpinan pewarisan”.²³

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan lanjutan. Namun demikian, biasanya faktor gurulah—yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperlukan—akan sangat menentukan keberadaan suatu pesantren. Pada umumnya dalam pendirian setiap pesantren, seorang pendiri memiliki kedalaman ilmu agama baik dalam hal tasawuf, fiqh, maupun tariqah. Hal ini akan memberikan warna lain dalam pesantren yang dipimpinnya, yang membedakan dengan pesantren lain.

Banyak khalayak yang bertanya, mengapa pesantren tetap bisa *survive* sampai hari ini? Secara implisit, pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa ada tradisi lama yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam dalam segi-segi tertentu yang masih relevan dengan perkembangan zaman. Di samping itu, bertahannya pesantren karena ia tidak hanya identik dengan makna keislamannya saja, akan tetapi karakter eksistensialnya mengandung arti keaslian (*indegenius*). Sebagai sesuatu yang *indegenius*, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakatnya. Menurut Nurcholis Madjid, jika kita tidak mengalami penjajahan, mungkin pertumbuhan sistem pendidikan pesantren akan mengikuti jalur pendidikan yang ada saat itu “pesantren”, sehingga perguruan tinggi yang ada sekarang ini tidak akan berupa Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Unair atau yang lainnya. Akan tetapi mungkin namanya akan Universitas Tremas, Bangkalan, Krapyak, Tebuireng, Lasem, Rembang, dan lain-

²² Sebutan kyai merupakan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena kewibawaannya sebagai pemimpin keagamaan. Istilah kyai ini digunakan di Jawa, Ajengan di Jawa Barat, Tuanku Guru digunakan di luar Jawa (Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Buya, Abu, dan lain-lain). Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1990).

²³ Pola kepemimpinan pewarisan, biasanya berlangsung secara turun-temurun; ketika pendirinya wafat, maka kepemimpinannya akan diserahkan kepada putranya, kalau putra pendirinya sudah wafat biasanya akan diteruskan oleh putranya yang lain, atau bahkan diteruskan oleh cucu, dan begitu seterusnya. Biasanya dalam pola yang sedemikian ini, kyai atau pemimpin pesantren memiliki kekuasaan mutlak.

lain. Kemungkinan di atas bisa terjadi setelah kita membandingkan dengan sistem pendidikan di Barat, di mana hampir semua universitas yang terkenal, cikal-bakalnya adalah perguruan-perguruan yang semula memiliki orientasi keagamaan.²⁴

Dalam sejarah perjuangan mengusir penjajahan di Indonesia, pondok pesantren banyak memberikan andil dalam bidang pendidikan untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Perjuangan ini dimulai oleh Pangeran Sabrang Lor (Patih Unus), Trenggono, Fatahillah (zaman kerajaan Demak yang berjuang mengusir penjajahan portugis pada abad ke 15), kemudian dilanjutkan pada masa Sultan Hassanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tengku Cik Ditiro, Pangeran Antasari,²⁵ dan lain-lain sampai pada masa revolusi pisik tahun 1945.²⁶ Agaknya heroisme kebangsaan dan intelektualisme keagamaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kaum santri. Keduanya membutuhkan tokoh ideal dalam bentuk kepemimpinan efektif dan fungsional. Hubungan kaum santri dan pimpinan dalam bentuk *teacher disciple realition* dilandasi sebuah pertalian yang tidak pernah putus, yaitu ikatan denominasi keagamaan yang berdimensi teologis. Signifikansi kehidupan keagamaan ulama dan santri dengan demikian merupakan alasan penting mengapa kontinuitas ini patuh terhadap penguasa-penguasa yang salah, dan dalam waktu yang sama mereka memperoleh *support* dari *the so called pious ruler*. Meskipun tidak ada dukungan dari pemerintah Indonesia ataupun sultan untuk memacu kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Jawa abad XIX M, akan tetapi pertumbuhannya terjadi secara *massif*.²⁷

Kini di tengah-tengah sistem pendidikan nasional yang selalu berubah-ubah, dalam jeda waktu yang tidak lama, apresiasi masyarakat Islam Indonesia terhadap pesantren semakin hari semakin besar. Pesantren yang pada mulanya sebagai *rural based-institution*, kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan *urban*, hal ini dapat dilihat kemunculan pesantren-pesantren kota seperti di Jakarta, Bandung, Medan, Pekanbaru, Yogyakarta, Malang, atau daerah *sub urban* Jakarta seperti Parung.

Menurut Maksum disebutkan bahwa madrasah baru berkembang pada abad XX yang mengadopsi sistem pendidikan mirip dengan Timur Tengah.²⁸ Hal ini disebabkan oleh adanya para pelopor intelektual Islam merupakan tamatan dari Timur Tengah yang peduli terhadap nasib bangsa Indonesia. Ada ahli antropologi

²⁴ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 3.

²⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2001).

²⁶ Marwan Saridjo, *Sejarah*, 7.

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Sejarah dan Budaya Pesantren dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Semarang: IAIN Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2002), 16-17.

²⁸ Lihat, Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, Logos, 1999), 97.

agama yang meneliti pendidikan Islam yaitu Karel Steenbrink mengidentifikasi bahwa ada empat faktor yang melatar belakangnya pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad XX di antaranya adalah;

1. Faktor keinginan untuk kembali kepada al-Quran dan al-Hadis.
2. Faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah.
3. Faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
4. Faktor pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.

Keempat faktor tersebut di atas, tidak serta merta mendorong pembaharuan Islam di Indonesia, melainkan bahwa gerakan pembaharuan yang terjadi di Indoensia menurut Karel mempunyai motif yang berbeda.²⁹

Apapun yang dikatakan oleh Karel, yang jelas ada keinginan yang kuat bagi para ulama atau intelektual muslim Indonesia untuk memperbaiki keadaan umat Islam di Indonesia yang masih belum memahami ajaran Islam secara benar. Oleh karena itu pendirian pendidikan atau madrasah merupakan salah satu hal pokok bagi pemahaman al-Quran dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Namun dalam perkembangannya madrasah tidak hanya sebagai pengajaran Islam, tetapi sudah berubah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama Islam, namun juga pengetahuan umum.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang eksistensinya tidak bisa dilepaskan para ulama atau intelektul muslim Indonesia yang peduli terhadap agama Islam. Dalam bukunya Mahmud Yunus disebutkan bahwa perkembangan pendidikan Islam bisa dibagi kedalam masa awal perintisan, masa awal penjajahan dan pasca kemerdekaan.³⁰

Hal ini pada tingkatan madrasah, yang mana pada Bab I, paal 1, ayat (2) dari SKB 3 Menteri dinyatakan bahwa tiga tingkatan Madrasah meliputi;

1. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar.
2. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
3. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Selanjutnya dari implikasi dari Bab pertama di atas menimbulkan Bab II (Pasal 2) disebutkan juga bahwa;

- a. Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan Ijazah sekolah Umum yang setingkat.

²⁹ Lihat, Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta; LP3ES, 1994), 27-29

³⁰ Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Mutiara, 1979).

- b. Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas.
- c. Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat.

Kalau dilihat dari isi tersebut posisi madrasah masih dibawah dengan sekolah umum, sebab tidak ada bunyi yang mengatakan bahwa Sekolah Umum dapat melanjutkan ke madrasah, namun walaupun tidak dinyatakan secara otomatis madrasah dibawah pembinaan sekolah Umum. Di satu sisi juga memberikan eksistensi yang kuat secara hukum bahwa madrasah sudah terintegrasi dengan Sistem Pendidikan Nasional yang pengelolaannya tanggung jawab pemerintah. Walaupun ada kesan bahwa setiap departemen mempunyai lembaga pendidikan sendiri-sendiri yang dibawah payung pendidikan nasional. Maka, yang terjadi adalah perubahan anggaran pendidikan yang diberikan pada pemerintah, bukan orientasi pendidikan yang benar-benar mengembangkan potensi peserta didik.³¹

Secara eksplisit dalam UUSPN No 20 tahun 2003, tidak disebutkan sama sekali tentang pendidikan Islam, baik dalam pasal, ayat ataupun dalam penjelasannya. Namun hal tersebut tidak kemudian serta merta meniadakan peran pendidikan Islam, karena secara implisit ternyata dalam beberapa pasal tetap mengakui adanya (jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam berupa madrasah (pasal 17-18). Dan juga mengakomodasi majlis taklim (pasal 26 ayat 4) dalam jalur pendidikan nonformal, serta mengakui lembaga pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat (pasal 55 ayat 1).

Meskipun UUSPN 2003 mengakui pendidikan Islam secara yuridis, pada kenyataannya jauh sebelum itu lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) telah melakukan proses pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pada kenyataannya pendidikan Islam mampu memberi warna dalam membentuk karakter bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka.³² Sampai saat ini pendidikan Islam berusaha untuk bertahan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan umat Islam.

Untuk itu era reformasi sekarang, DPR dan Pemerintah peduli terhadap peningkatan pendidikan nasional yang dituangkan ke dalam bentuk UU No. 20

³¹ Ainurrofiq Dawam, "Pendidikan terpadu Sebagai Sebuah Sistem Pendidikan Nasional Alternatif; Sebuah Pikiran Sederhana", dalam "Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran seputar, Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya" Presma Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, 72-74

³² Shaleh, *Madrasah*, hlm 19. untuk tepatnya madrasah pertama di Padang didirikan oleh Syaikh Amrullah Ahmad (1907), di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan (1912), di Surabaya oleh K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansyur (1914), di Padang Panjang oleh Rangkayo Rahmah Yunusi (1915), dan di Jombang oleh K.H. Hashim Asy'ari (1919).

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut terutama pada BAB VI (Pasal 17 ayat 2) dikatakan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsnawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman di atas madrasah sudah menjadi bagian sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, umat Islam perlu mengapresiasi dan mengembangkan supaya madrasah menjadi pendidikan ideal yang mampu membawa masyarakat Islam umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya untuk mewujudkan masyarakat madani.

Secara kelembagaan jumlah lembaga pendidikan Islam formal (madrasah dan PTAI), nonformal (majlis taklim), dan pendidikan berbasis masyarakat (pesantren) sangat banyak. Di antaranya adalah jumlah MI sebanyak 23.298, MTs sebanyak 9.846, MA sebanyak 3392. IAIN berjumlah 14 seluruh Indonesia.³³ Belum termasuk pendidikan Islam pesantren yang jumlahnya puluhan ribu, dan juga tpa yang mencapai ratusan ribu di seluruh Indonesia.

Meskipun secara kelembagaan jumlah pendidikan Islam sangat banyak, namun pada kenyataannya belum mampu menjadi solusi yang tepat untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan bangsa Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita semua sejauhmana pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia, sudah efektifkah metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan semula? Sebenarnya yang menjadi permasalahan itu terletak pada kurikulum, sarana prasarana (baik (*hard ware dan soft ware*), metodologi, atau SDM-nya?

Selain permasalahan tersebut, wajah pendidikan Islam di Indonesia dalam sistem pendidikan nasional memang pada kenyataannya belum mendapatkan posisi yang sejajar dengan pendidikan umum. Hal tersebut dapat dilihat seumpama saja dari sisi pendanaan yang relatif timpang antara STAIN/IAIN/ UIN dibandingkan dengan IKIP/Universitas Negeri. Dalam pembiayaan untuk penyelenggaraan satu Universitas Negeri/ tahun setara dengan 14 IAIN seluruh Indonesia.³⁴

Meski secara landasan yuridis pendidikan Islam tidak disebut secara eksplisit, namun legitimasi terhadap keberadaan pendidikan Islam secara implisit disebut dengan jelas dalam beberapa ayat dalam UUSPN 2003. Hal tersebut tidak serta merta mampu merubah kualitas pendidikan Islam kearah yang lebih baik. Pada kenyataannya pembenahan yang dilakukan terhadap kurikulum, kompetensi pendidik, sarana-prasarana, pendanaan. supaya pendidikan Islam lebih maju tidak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah saja (DEPAG/DEPDIKNAS) saja.

³³ hlm. 71. diambil dari statistik MI, MTs, MA se-Indonesia.

³⁴ Shaleh, *Madrasah*, hlm 59.

Keseriusan dalam membenahan kualitas pendidikan Islam sebenarnya berimbas kepada peningkatan kualitas bangsa, namun belum adanya *political will* pemerintah dalam menggerakkan semua potensi yang ada dan menempatkan prioritas utama terhadap pendidikan Islam maupun pendidikan nasional menyebabkan posisi pendidikan nasional maupun pendidikan Islam terpinggirkan secara sistematis.

Dengan kata lain UUSPN 2003 hanya sebatas kata-kata tanpa pelaksanaan dan implementasi yang sungguh-sungguh untuk memajukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Bagaimana pendidikan Islam memiliki kualitas yang tinggi, kalau dalam sisi lain secara umum pendidikan nasional masih terpinggirkan? Hal tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yang satu mempengaruhi yang lain. Pendidikan Islam belum dianggap serius untuk dibenahi menurut kacamata birokrasi, hal ini dapat dilihat salah satunya dari alokasi dana yang sangat sedikit (+/- 5% dari total APBN setiap tahun) untuk pendidikan nasional, meski dengan jelas UUSPN 2003 mengharuskan dana membenahan kualitas pendidikan -diluar gaji Guru dan Dosen- minimal sebesar 20 % (pasal 49 ayat 1).³⁵

PENUTUP

Masalah pendidikan memang tidak bisa dilepaskan adanya faktor politik yang melatarbelakanginya sejak belum berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini tentu sekak jaman penjajahan di mana pendidikan Islam selalu dibatasi oleh kolonial. Sampai Indonesia merdeka pun polemik ini terjadi sejak berdirinya bangsa ini, antara kelompok Muslim dan kelompok Nasionalis; apakah pendidikan agama itu perlu diajarkan di sekolah-sekolah umum, atau tidak diajarkan dan diganti dengan pelajaran Budi Pekerti, akhirnya kelompok muslim mengusulkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah-sekolah umum, sebab sesuai dengan semangan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara yuridis formal pendidikan Islam hanya dikenal dengan sebutan “pendidikan Islam yang hanya dipahami sebagai bagian dari ciri khas keislaman”. Dalam hal ini, paling tidak menjadi awal dari penempatan pendidikan Islam dalam bagian sistem pendidikan nasional, walaupun dalam kebijakannya pendidikan Islam jauh lebih yang diharapkan masyarakat muslim. Dalam kenyataan empiris pendidikan Islam lebih mandiri dan bertahan demi memperjuangkan pendidikan Islam untuk lebih baik dari sebelumnya.

³⁵ Lihat UUSPN 2003 BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN, Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan.

Pandangan pendidikan Islam sebagai *second class* tidak sepenuhnya salah, dalam kenyataannya pendidikan Islam mau tidak mau lebih mengikuti kebijakan pendidikan nasional, pendidikan Islam tidak memiliki kemandirian penuh dalam pelaksanaan pendidikannya.. Pendidikan Islam sering dipinggirkan melalui kebijakan yang tidak menguntungkan dan bahkan cenderung dinomorduakan. Karena kebijakan yang tidak menguntungkan pendidikan Islam, sehingga dalam perkembangannya (madrasah, pesantren, PTAIN) memiliki kualitas yang rendah dalam sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Heri Noer, *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Azra, Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1990.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang 1970.
- Dawam, Ainurrofiq, "Pendidikan terpadu Sebagai Sebuah Sistem Pendidikan Nasional Alternatif; Sebuah Pikiran Sederhana", dalam "*Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran seputar, Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya*" Presma Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Hamami, Tasman, "Membangun Visi Baru Pendidikan Agama Islam", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. I, Januari 2003.
- Joyonegoro, Wardiman, *Potensi Serta Peran Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Makalah disajikan dalam Musyawarah IV RMI di PP As-Shidiqiyah, 1 Februari 1994.
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos, 1999.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001.
- Rosyadi, Khoiron, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

- Saridjo, Marwan, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bakti, 1982.
- Shaleh, Abdul Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shaleh, Abdul Rahman. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta; LP3ES, 1994.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosdakarya , 1994.
- Tilaar, H.A.R. *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif abad 21*, Jakarta, Ter Indonesia, 1998.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Media Wacana, Yogyakarta, 2003.
- Wahid, Abdurrahman, *Sejarah dan Budaya Pesantren dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Semarang: IAIN Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979.
- Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.